

Mereka Muncul Memba

Andi Arief, Ketua SMID, akhirnya muncul di Mabes Polri. Polisi belum mau menjelaskan siapa yang menyerahkan Andi ke mabes itu.

JIKA SAJA INI PERMAINAN SULAP, tentulah penonton akan bersorak ketika orang yang dihilangkan tukang sulap dimunculkan lagi, segar-bugar tak kurang suatu apa.

Tapi ini bukan sulap. Maka, ketika mereka yang dikabarkan hilang muncul lagi tak ada tepuk tangan. Yang ada adalah pertanyaan, ke mana dan apa yang terjadi selama mereka hilang; dan kenapa mereka tak mau bercerita tentang itu. Itulah yang muncul, baik ketika dikabarkan Pius Rustilana (Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi Rakyat atau Aldera) ataupun Desmon J. Mahesa (Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara) sampai Haryanto Taslam (Wakil Sekjen PDI versi Munas 1993) dan yang terbaru Andi Arief (Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID) muncul kembali dari hilang. Semuanya muncul dan pulang kepada keluarga, kecuali Andi Arief yang muncul di tahanan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Bila dalam kasus tiga yang pertama yang bersangkutan tak bersedia bercerita, dalam hal Andi Arief bukan cuma dia yang bungkam, pun polisi tak mau menjawab pertanyaan wartawan sekitar ini: kapan persisnya Andi sampai di Mabes Polri, dalam keadaan bagaimana, dan ia diserahkan ke polisi oleh siapa.

Adalah pemberitahuan lewat telepon yang diterima Munir, Koordinator Pelaksana Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, pada 22 April, Rabu pagi pekan lalu. Telepon memberi tahu keberadaan Andi yang diculik pada 28 Maret dari tempat tinggal kakaknya di Bandarlampung. Telepon itu sendiri berasal dari Letnan Kolonel Lubis, Wakil Direktur Serse Umum Markas Besar Polri.

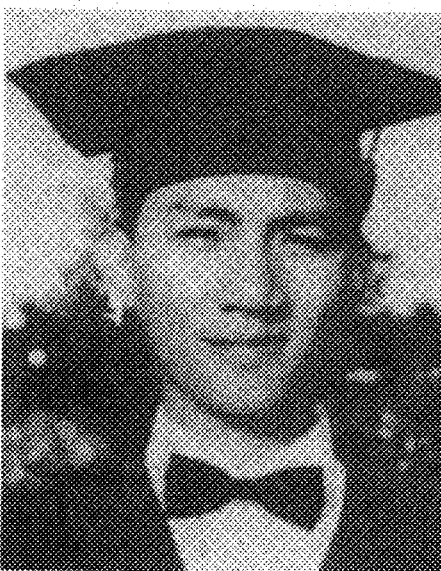
Untuk memastikan kabar tersebut, Munir bersama kakak kandung Andi, Edi Irawan—juga ditelepon Lubis—mendatangi Mabes Polri. Benar saja, Munir dan Edi bertemu dengan Andi. "Saya sempat berbicara dengan dia dan ia sehat secara psikologis dan fisik," kata Munir.

Kepada kakaknya dan Munir, Andi tak banyak cerita. Entah bila polisi mulai menyusun berita acara pemeriksaan, karena Andi disangka terlibat dalam kasus bom meledak di Tanahbunggi, Jakarta Pusat, pertengahan Januari lalu. Akankah ketika itu hilangnya

Andi menjadi jelas?

Yang juga berjanji, setidaknya begitulah yang dikatakan kepada wartawan, akan menceritakan kisah hilangnya adalah Haryanto Taslam, yaitu setelah ia melapor dan mendapat izin Ketua Umum DPP PDI versi Munas 1993, Megawati Soekarnoputri.

Tapi, hingga pekan lalu, Haryanto belum memberikan keterangan. Yang ada adalah pernyataan yang dikeluarkan DPP PDI Me-



ANDI ARIEF. Bukan sulap.

Tentunya, bukan sekadar menemukan, tapi juga polisi diharapkan mengungkapkan apa dan siapa di balik hilang dan muncul kembalinya para aktivis itu... agar masyarakat menjadi tak waswas... dunia internasional mendapatkan informasi yang transparan....

gawati tertanggal Jumat, 24 April, bahwa hilangnya Haryanto karena yang bersangkutan sengaja menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Pernyataan yang ditandatangani Ketua Soetardjo Soerjogocertino dan Sekretaris Jenderal Alex Litaay itu dikatakan dibuat setelah mendengarkan keterangan Haryanto.

Skenario yang Sama

Kisah hilangnya orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah tersebut tampaknya punya skenario yang sama: dijemput sejumlah orang, lalu tak diketahui rimbanya, sampai kemudian tiba-tiba muncul lagi dan tak bersedia memberikan keterangan terperinci soal hilangnya. Seperti yang dituturkan Andi Arief kepada Munir, ia diculik di Bandarlampung oleh orang dengan ciri-ciri tertentu, yang langsung membawanya dalam keadaan mata tertutup.

Namun, Andi bisa tahu bahwa ia dibawa menyeberang ke tanah Jawa lewat Pelabuhan Bakabeni karena tutup matanya dibuka. Tapi, ia tetap tidak tahu siapa penculiknya. Sesampainya di sebuah bangunan—kemungkinan di Jakarta—ia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan tertutup dan gelap. Mulai hari itu juga, siang-malam, Andi diinterogasi. Hiburan satu-satunya adalah mendengarkan siaran radio swasta yang disetel oleh penculiknya selama 24 jam. Selain lagu-lagu, dari siaran itu pula Andi mendengar berita tentang penculikannya.

Hanya itulah cerita Andi. "Karena suasananya belum memungkinkan kami berbicara lebih jauh," kata Munir menceritakan penuturan Andi. Menurut Munir, ia yakin bahwa aktivis seperti Herman Hendrawan, Raharjo Waluyo Djati, dan Feisol Riza—ketiganya dari Komite Nasional Pemuda untuk Demokrasi, yang dianggap oleh aparat keamanan sebagai jelmaan Partai Rakyat Demokratik—tampaknya bakal "muncul" juga di Mabes Polri.

Menurut Munir, Andi berada di Mabes Polri baru pada 17 April. Dengan demikian ada masa 24 hari yang belum jelas, siapa yang menyekap Andi Arief. Munir, selaku pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, pernah datang ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, mencari kejelasan hilangnya Andi. Ketika itu tanggal 6 April, beberapa hari setelah Andi diculik. Ia mendapat informasi bahwa pihak kepolisian da-

Iwa Tanda Tanya

rah sudah berniat menangkap Andi. Namun, surat perintah penahanan batal dikirim karena bukannya keburu diculik.

Terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak di luar kepolisian yang melakukan penculikan, Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigadir Jenderal Mokodongan keberatan jika tuduhan itu langsung di arahkan ke ABRI. "Kalau memang terbukti, kami punya kewenangan untuk menangkap dan menghukum, bahkan memecatnya," kata Moko-

dongan.

Agar simpang-siur tentang siapa pihak-pihak yang melakukan aksi penculikan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, tampaknya apa yang dikatakan Kepala Sosial-Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono perlu dilakukan. "Panglima ABRI sudah memerintahkan kepada polisi untuk mencari orang-orang yang dilaporkan hilang," kata Bambang Yudhoyono, Sabtu lalu. "kami telah memberi

mandat kepada pihak kepolisian untuk menangannya."

Tentunya, bukan sekadar menemukan, tapi juga polisi diharapkan mengungkapkan apa dan siapa di balik hilang dan muncul kembalinya para aktivis itu. Manfaatnya jelas, agar masyarakat menjadi tak waswas. Juga, dunia internasional mendapatkan informasi yang transparan, sehingga tak perlu ada pandangan miring—apalagi sanksi—buat Indonesia. Dengan demikian, Amien Rais bisa menjawab gambang andai ada pertanyaan tentang orang hilang di Indonesia belakangan ini (lihat *Dari Jenewa sampai Washington: Citra Kita*).

Rustam F. Mandayun/Laporan Budi Nugroho dan
Narna Sibero

Mereka Menyalakan Pelita

KEPRIHATINAN TERUS BERGULIR, KEKECEWAAN menumpuk, yang hilang meski beberapa sudah muncul lagi tak menjelaskan ihwal hilangnya mereka itu—mereka bungkam.

Dalam suasana semacam ini muncul inisiatif dari sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat yang prihatin terhadap kehidupan bermasyarakat. Jumat, 24 April pekan lalu, mereka memproklamasikan berdirinya Tim Relawan untuk Kemanusiaan.

Mereka yang terlibat adalah orang-orang yang selama ini dikenal aktif memberikan advokasi terhadap korban-korban perlakuan di luar norma hukum. Misalnya, mereka yang aktif itu adalah Karlina Leksono Supelli, astronom dan pengagas kegiatan Suara Ibu Peduli; Ita Fatta Nadia dari Kalyanamitra; Abdul Hakim Garuda Nusantara dari Elsam; dan Masdar F. Mas'udi dari Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Masa Depan Kelabu

Mereka membacakan pernyataan berjudul "Teror Hati Nurani di Sebuah Negara Hukum" di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini merupakan cemin dari "hati nurani kami yang demikian tergetar menyaksikan ketidakadilan dan kekerasan politik yang menimpa kaum muda di penjuru Tanah Air", demikian antara lain isi pernyataan itu.

Untuk itu mereka menyediakan waktu dan tenaga untuk mengumpulkan semua informasi yang menyangkut kekerasan, penculikan, dan ketidakadilan yang dialami orang-orang muda tersebut. "Bagi kami, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, perlakuan terhadap kaum muda yang menggunakan kekerasan melawan hukum dan hak asasi manusia, mencerminkan masa depan bangsa yang kelabu," begitu bunyi pembacaan pernyataan itu.

Masib dalam bingkai gerakan moral yang sama, sebuah

keprihatinan juga disampaikan oleh sejumlah tokoh dan rohaniwan, 17 April lalu. Sebuah pernyataan yang diberi judul "Hati Nurani yang Prihatin" antara lain ditandatangani Romo Sandyawan, pendeta yang Ketua Gereja Kristen Jawa Timur Prof. Dr. Wisnanddy Wahono, dan dokter sekaligus rohaniwan Paul Tahalele.

Dalam pernyataan tersebut dicantumkan tuntutan kepada pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Antara lain, isi tuntutan itu: memastikan keberadaan mereka yang ditangkap, menjamin keselamatan jiwanya, peradilan yang obyektif, jujur dan adil, tindakan hukum terhadap pihak/institusi/lembaga yang



PENGADUAN ORANG HILANG DI KOMNAS HAM. Mereka bungkam.

melakukan penangkapan dan penahanan di luar prosedur hukum, dan memohon Komisi Nasional Hak Asasi Manusia proaktif terhadap akibat dari perlakuan yang sewenang-wenang itu.

Tindakan para relawan maupun rohaniwan di atas paling tidak merefleksikan sebuah kata-kata bijak yang perlu direnungkan: "Jangan menggerutu kepada kegelapan. Nyalakanlah lilin."

R.F.M./Laporan Rachmat H. Cahyono